

BAB IV

UPAYA INDONESIA MENGHADAPI ISIS DI ASIA TENGGARA

ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang telah disepakati dunia internasional sebagai terorisme internasional, kini tidak hanya melakukan aksinya di Irak dan Suriah saja. Namun, telah menyebar ke beberapa negara termasuk negara-negara kawasan Asia Tenggara. Indonesia salah satunya. Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, negara terbesar, serta penduduk Muslimnya paling banyak tidak luput dari aksi ISIS. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi masalah ini dan berdasarkan kerangka pemikiran pada Bab I, sebagai berikut:

A. Prevention: Mencegah Masyarakat Dari Pengaruh ISIS

Sebuah upaya mencegah orang-orang masuk ke dalam jaringan terorisme, baik dalam lingkup suatu negara, kawasan, maupun internasional. Menanggulangi faktor atau akar penyebab yang dapat menyebabkan radikalisisasi dan rekrutmen oleh para anggota terorisme. Upaya prevention dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan dialog antaragama dan antarbudaya.

Terorisme tidak bisa dibenarkan. Kita harus mengidentifikasi dan melawannya agar masyarakat tidak masuk dalam jaringan terorisme. Jaringan terorisme dapat dilawan dengan keterlibatan masyarakat, khususnya umat Muslim. Karena sering sekali terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama Islam. Untuk mencegah perekrutan terorisme kita dapat mencegahnya

dengan mengacaukan, mengganggu aktivitas mereka seperti pada perekrutan teroris melalui akses jaringan internet maupun yang secara langsung.

Tidak sedikit organisasi teroris itu menyebarkan pandangan ekstremis yang membawa individu mempertimbangkan dan membenarkan kekerasan. Di samping itu juga ada berbagai kondisi di masyarakat yang dapat menciptakan sebuah lingkungan dimana individu-individu dapat dengan mudah teradikalisasi. Untuk melawannya kita harus meningkatkan keamanan, keadilan, demokrasi. Kita perlu memastikan kepada masyarakat bahwa pendapat-pendapat utama yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok ekstremis itu salah, seperti misalnya yang membenarkan adanya kekerasan, melakukan jihad dengan melakukan pemboman. Strategi ini dilakukan dengan melibatkan organisasi-organisasi Muslim dan kelompok-kelompok agama yang menolak ide-ide yang dikemukakan oleh jaringan terorisme.

Dalam menghadapi ISIS yang mulai masuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia telah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan prinsip prevention ini, seperti:

A1. Dialog atau Sosialisasi Antaragama dan Budaya Islam

Sebagaimana umumnya mengenai kasus terorisme pasca tragedi 11 September 2001, terorisme sering kali mengatasnamakan agama “Islam” dalam segala tindakannya. Oleh karena itu, perlu sekali adanya dialog-dialog mengenai agama Islam beserta budayanya yang benar (pada umumnya).

Dalam kasus ISIS di Indonesia khususnya, *pertama*, Panglima TNI Jenderal Moeldoko adakan pertemuan dengan para tokoh ormas Islam. Pertemuan antara TNI dengan tokoh Islam termasuk Ketua PBNU Said Aqil dan Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin digelar di Aula Gatot Subtoro, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 10 September 2014. Pertemuan tersebut diadakan guna untuk membahas ancaman yang bisa berkembang akibat tumbuhnya ISIS di Indonesia. Moeldoko pun mendengarkan masukan-masukan yang diberikan Aqil dan Din.¹ Panglima TNI tersebut meminta izin jika ke depannya prajurit TNI akan masuk ke pesantren-pesantren guna mengantisipasi penyebaran ISIS di Indonesia. Hal ini dilakukan terutama dalam memperhatikan atau memfokuskan lebih terhadap pesantren-pesantren baru dimana beberapa diantaranya dapat berpotensi mengajarkan hal yang tidak benar karena pemimpinnya terindikasi teroris.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sering kali terorisme mengatasnamakan agama Islam sebagai dasar tindakan mereka, TNI tentu ingin mengetahui juga tentang Islam yang sebenarnya. Mereka ingin mendengar masukan dari para ulama Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran pengaruh ISIS di dalam negeri. Tentunya juga agar TNI tidak melakukan tindakan yang tidak memakai dasar terutama tentang agama dalam membasmi ISIS di Indonesia.

Seperti yang kita ketahui, dua organisasi Islam mayoritas masyarakat Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki rasa toleransi yang tinggi dalam kehidupan bersama dan beragama. Oleh karena itu,

¹<http://hariansib.co/mobile/?open=content&id=28559> diakses pada tanggal 8 Maret 2015

dengan adanya kerjasama TNI beserta NU dan Muhammadiyah ini dapat menghentikan paham yang dibawa oleh ISIS yang mana dapat mengancam persatuan Indonesia tidak berkembang di Indonesia.

Kemudian, pada tanggal 6 Agustus 2014, secara langsung, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko mendatangi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk meminta izin sosialisasi terkait ISIS ke sekolah-sekolah.² Upaya tersebut dimaksudkan agar dapat mencegah berkembangnya pengaruh ISIS di kalangan anak muda. Karena tidak jarang dalam kasus-kasus kelompok radikal para anggotanya itu adalah anak muda. Terlebih mereka yang dalam hal pengetahuan tentang agamanya tidak terlalu dalam, sehingga mereka dengan mudah dicuci otaknya oleh kelompok-kelompok radikal untuk menjadi anggotanya, tak terkecuali ISIS saat ini.

Kedua, lebih dari 300 ulama dari Jawa dan Sumatera [berkumpul](#) di Pondok Pesantren Al Hikam di Depok di pinggiran selatan Jakarta dari tanggal 6-8 Desember 2014 untuk meningkatkan kesadaran terhadap terorisme dan upaya pencegahannya.³ Acara bertemakan “Penguatan Persaudaraan dan Kontraterorisme untuk Keamanan Nasional” tersebut, digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dengan diadakannya pertemuan-pertemuan antartokoh agama atau ulama dari berbagai daerah di Indonesia, dapat memberikan peran penting bagi

²<http://www.radarbanyumas.co.id/hadang-isis-tni-sosialisasi-ke-sekolah/> diakses pada tanggal 9 Maret 2015

³<http://khabarsoutheastasia.com/id/articles/apwi/articles/features/2014/12/12/feature-04> diakses pada tanggal 8 Maret 2015

masyarakat. Para ulama agar dapat berfungsi sebagai tameng (perisai) melawan terorisme, mencegah agar tidak lebih banyak perekrutan dan juga untuk terus menyebarkan perdamaian seperti yang diajarkan Islam sebenarnya. Karena tak sedikit orang yang berhasil direkrut ISIS ini telah dicuci otak mereka dengan ideologi yang salah, yang sama sekali tidak mencerminkan ajaran dalam Islam.

Ketiga, berbicara soal ISIS, para tokoh Muslim Indonesia seperti dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah memberikan respon dan sikap yang sama, yaitu menolak tegas seruan ISIS. Hal ini terlihat dari beberapa aksi para tokoh dari NU, Muhammadiyah, maupun MUI di beberapa daerah di Indonesia. Diantaranya, khatib-khatib salat Jumat di sejumlah masjid di Kabupaten Lumajang (Jawa Timur) mengusung tema ceramah tentang kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Isi ceramah atau khotbah mereka hampir seragam: mengecam ISIS.⁴

Dari NU, KH. Masruri Zain, dalam khotbahnya berbicara tentang kebrutalan yang dilakukan ISIS di hadapan lebih dari 1.000 jemaah di Masjid Agung Anas Mahfudz, masjid terbesar di Lumajang. Beliau menjelaskan bahwa ISIS adalah gerakan yang brutal dan tidak segan untuk membunuh siapa saja yang berbeda paham dengan mereka. Materi khotbah tentang ISIS juga dibawakan oleh khatib sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas, sebuah masjid kalangan Muhammadiyah Lumajang. Isi khotbah tersebut juga mengutuk kekerasan yang dilakukan kelompok ISIS. Terutama ditujukan untuk kaum muda agar jangan sampai

⁴<http://www.tempo.co/read/news/2014/08/15/078599881/Khotbah-di-Masjid-NU-dan-Muhammadiyah-ISIS-Sesat> diakses pada tanggal 10 Maret 2015

terjerumus masuk dalam golongan ISIS. Para orang tua diminta untuk tetap menasihati dan mengawasi anak masing-masing.

Begitu juga di Kabupaten Tuban (Jawa Timur), pemerintah Kabupaten Tuban menggandeng sejumlah ulama di daerah itu untuk menangkal berkembangnya jaringan gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and Syria/ISIS).⁵ Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengatakan bahwa pihaknya telah mengundang ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia agar membantu memberi pemahaman ke masyarakat tentang oraganisasi ISIS.

Kemudian di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas melarang tumbuh dan berkembangnya gerakan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Negara Islam di Irak dan Suriah. Bahkan, gerakan radikal ini juga disebut sebagai salah satu perbuatan yang dilarang bagi umat Islam atau dinyatakan sebagai gerakan haram.⁶

Wakil Ketua MUI, KH. Maruf Amin menyatakan ISIS tidak sesuai dengan karakter Islam. ISIS menjadi haram karena tindakan mereka seperti melakukan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuannya telah keluar dari ajaran Islam. ISIS juga dapat berpotensi memecah-belah umat Islam.

⁵<http://www.tempo.co/read/news/2014/08/07/078597776/Ulama-NU-dan-Muhammadiyah-Diajak-Tangkal-ISIS> diakses pada tanggal 10 Maret 2015

⁶<http://news.liputan6.com/read/2087796/mui-tidak-perlu-fatwa-isis-sudah-haram> diakses pada tanggal 10 Maret 2015

Berhubungan dengan pandangan tersebut, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan sikap sebagai berikut:⁷

1. Menolak gerakan dan paham Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia karena bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam. Cara-cara kekerasan yang dipergunakan ISIS untuk mencapai tujuan sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan perdamaian, kesantunan, dan keadaban, serta dapat membawa kemunduran bagi masa depan peradaban.
2. Muhammadiyah juga menolak gerakan dan paham ISIS karena bertentangan dengan prinsip ideologi yang terkandung dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH), Khittah Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIM), Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua, dan gagasan Indonesia Berkemajuan.
3. Gerakan ISIS yang bertujuan mendirikan kekhalifahan dan menolak Pancasila sebagai dasar negara jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah dan Pemerintah Daerah hendaknya menolak pendirian ISIS dan organisasi, perkumpulan dan yayasan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Aparatur Keamanan dan Penegak Hukum hendaknya menindak tegas setiap

⁷<http://www.muhammadiyah.or.id/muhfile/download/Pernyataan%20Sikap%20Muhammadiyah%20tentang%20%20ISIS.pdf> diakses pada tanggal 3 Februari 2015

perbuatan melanggar hukum untuk menciptakan perdamaian dan menjamin rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

4. Warga Muhammadiyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya hendaknya tidak terpengaruh oleh dan tidak memberi peluang bagi berkembangnya gagasan dan gerakan ISIS yang hanya akan memecah belah persatuan bangsa dan melemahkan ukhuwah Islamiyah.
5. Pimpinan Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah hendaknya mewaspadaai setiap bentuk propaganda ISIS dnegan melakukan usaha-usaha preventif melalui berbagai kegiatan pengkajian Islam yang luas dan mendalam sesuai faham Muhammadiyah, pembinaan dan peneguhan ideologi melalui Baitul Arqam, dan tetap berkhidmah mencurahkan lebih banyak energi untuk memajukan umat dan bangsa melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, ekonomi, dan program-program kemanusiaan yang luhur.

Begitupun dengan Forum Ukhuwah Islamiyah MUI yang terdiri dari Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam Tingkat Pusat, setelah mencermati perkembangan ISIS yang ada, menyatakan:⁸

1. Islamic State of Irak and Syam (ISIS), adalah gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam di Irak dan Syria namun tidak mengedepankan watak Islam yang rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi

⁸<http://mui.or.id/mui/homepage/berita/berita-singkat/press-release-pernyataan-sikap-fu-mui-tentang-isis.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2015

alam semesta). Sebaliknya, ISIS menggunakan pendekatan pemaksaan kehendak, kekerasan, pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa, penghancuran terhadap tempat-tempat yang dianggap suci oleh umat Islam, serta ingin meruntuhkan negara bangsa yang sudah berdiri sebagai hasil perjuangan umat Islam melawan penjajahan.

2. Ormas-ormas dan lembaga-lembaga Islam di Indonesia menolak keberadaan gerakan ISIS di Indonesia yang dinilai sangat potensial memecah belah persatuan umat Islam dan menggoyahkan NKRI berdasarkan Pancasila.
3. Menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk tidak terhasut oleh agitasi dan provokasi ISIS yang berusaha untuk menjelmakan cita-cita ISIS, baik di Indonesia maupun di dunia. Kepada segenap organisasi/lembaga Islam, masjid/mushalla, dan keluarga Muslim untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan upaya menangkal berkembangnya gerakan ISIS di seluruh pelosok Tanah Air.
4. Mendukung langkah cepat, tepat, dan tegas Pemerintah untuk melarang Gerakan ISIS di Indonesia, dan mendorong Pemerintah melakukan upaya penegakan hukum sesuai dengan perundangan yang berlaku.

A2. Memperketat Pengawasan Keamanan Lembaga Masyarakat

Selain upaya berdialog tentang agama Islam seperti di atas, Indonesia juga berupaya untuk lebih memperketat pengawasan terhadap para narapidana kasus

terorisme di lembaga-lembaga pemasyarakatan.⁹ Karena disinyalir bahwa Warga Negara Indonesia yang ikut bergabung dengan ISIS (baik di Indonesia sendiri maupun di Irak dan Suriah) sebagian tidak lain merupakan mantan narapidana kasus terorisme yang telah menjalani masa hukumannya di balik jeruji besi.

Upaya ini merupakan bagian dari kerjasama pemerintah Indonesia dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan upaya pengetatan dan pengawasan narapidana terorisme yang ada di lembaga pemasyarakatan. Sehubungan dengan upaya ini, Indonesia juga akan meningkatkan pengawasan kewaspadaan terhadap daerah-daerah yang dinilai sebagai kawasan “klasik” dari sumber-sumber gerakan radikal, salah satu contohnya adalah Poso, Sulawesi Tengah. Mengingat di Poso memang terdapat kelompok bersenjata radikal Islam yang sudah lama menjadi musuh, berkonflik dengan aparat keamanan Indonesia. Dikhawatirkan kelompok ISIS akan dapat bekerjasama dengan kelompok radikal dalam negeri, oleh karena itu meningkatkan pengawasan kewaspadaan terhadap daerah-daerah terpencil tersebut sangatlah penting dalam upaya Indonesia menghadapi ISIS.

A3. Penggunaan Kekuatan Militer

Adapun upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi terorisme ISIS yang dalam perkembangannya kini menyebar ke Asia Tenggara, yaitu penggunaan kekuatan militer. Penggunaan kekuatan militer dalam rangka

⁹<http://metrobalik.com/2014/09/15/pemerintah-indonesia-kerahkan-beragam-upaya-tanggulangi-isis/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2014

menghadapi terorisme bukanlah suatu hal yang asing lagi, apalagi jika kekuatan terorisme sudah mengarah pada mengancam kedaulatan negara. Dalam kasus ini yaitu menghadapi ISIS yang telah berkembang di kawasan Asia Tenggara, Indonesia salah satunya. ISIS merupakan gerakan lintas negara yang bertujuan mendirikan negara sendiri (kekhalifahan Islam). Sebuah gerakan ekstrim yang tidak menghormati kedaulatan negara.

Dalam menghadapi ISIS, pasukan Penanggulangan Teror (Gultor) TNI dari Tri Matra (Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut) melaksanakan Latihan Gabungan IX tahun 2014 yang diikuti 627 personel.

Latihan gabungan yang mengambil tema "Sat Passus TNI melaksanakan penanggulangan teror untuk memelihara stabilitas keamanan dan menegakkan kedaulatan NKRI dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP)" dibuka langsung oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Batalyon Komando (Yonko) 461 Paskhas Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 1 Desember 2014.¹⁰ Tujuan dilaksanakannya latihan tersebut ialah untuk meningkatkan kemampuan khusus TNI dalam menghadapi tugas-tugas operasi yang bersifat khusus untuk melawan kelompok-kelompok seperti ISIS.

Masih dalam waktu yang sama, Desember 2014, Indonesia kembali dikejutkan dengan kemunculan sebuah video dari ISIS, yang kali ini berisikan salah seorang anggota ISIS mengancam TNI. Militan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menantang Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik

¹⁰<http://nasional.sindonews.com/read/931113/14/panglima-tni-buka-latgab-latihan-gultor-tni-tri-matra-ix-2014-1417402474> diakses pada tanggal 8 Maret 2015

Indonesia. Tantangan ini disampaikan Abu Jandal Al Yamani Al Indonesi melalui video di Youtube. Dalam pernyataannya, Abu Jandal menanggapi keinginan Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang ingin bergabung dengan negara-negara koalisi untuk membasmi kelompok ISIS di kawasan Asia Tenggara.¹¹ Mereka mengancam apabila TNI tidak menuruti kemauan ISIS untuk datang langsung memerangi mereka di Irak atau Suriah, maka mereka (ISIS) yang akan mendatangi TNI (ke Indonesia) untuk menegakkan syariat Allah. Tentu hal ini tidak boleh dianggap remeh, mengingat ISIS oraganisasi teroris yang amat kejam abad ini.

A4. Melakukan Penangkapan Anggota ISIS di Indonesia

Dalam menghdapi ISIS, pihak keamanan Indonesia telah melakukan beberapa penangkapan terhadap anggota teroris ISIS yang ada di Indonesia. Diantaranya, tertangkapnya empat Warga Negara Asing (WNA) dengan paspor palsu Turki di Sulawesi Tengah membuktikan suksesnya komunikasi kelompok Negara Islam Irak-Suriah (ISIS) dengan kelompok teroris di Indonesia.¹²

Penangkapan empat WNA tersebut dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri, pada September 2014 yang merupakan keberhasilan deteksi dini intelijen. Penangkapan tersebut diharapkan dapat memberi petunjuk Indonesia untuk mengetahui lebih jelas tentang cara berkomunikasi antara jaringan kelompok teroris Indonesia dengan ISIS.

¹¹<http://m.news.viva.co.id/news/read/572096-tantang-panglima-tni--isis-akan-bantai-tentara-dan-anggota-polri> diakses pada tanggal 8 Maret 2015

¹²<http://www.intelijen.co.id/isis-diduga-kirim-dana-langsung-ke-kelompok-santoso-di-poso/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2014

Sebagaimana diketahui, di Poso, Sulawesi Tengah terdapat jaringan terorisme Santoso. Diduga hubungan antara kedua kelompok teroris tersebut saling menguntungkan. Kelompok Santoso sedang membutuhkan dana dan bantuan persenjataan dari luar, sedangkan ISIS sedang memerlukan jaringan untuk melebarkan pengaruhnya ke Indonesia. Empat WNA yang tersebut ditangkap bersama tiga WNI lainnya. Hal ini menunjukkan jika terkait soal dana, para teroris tidak lagi melakukannya melalui proses transfer atau perbankan. Karena pasti akan mudah terdeteksi oleh aparat keamanan. Oleh karenanya, cara yang ditempuh para teroris ini yakni kembali pada cara klasik, cash and carry.

Pada Agustus 2014, petugas gabungan dari TNI dan Polri mengamankan tujuh orang yang diduga anggota gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), dan salah satunya diketahui bernama Chep Hermawan. Chep Hernawan merupakan pemimpin Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) regional Indonesia dan pernah menyatakan diri sebagai Presiden ISIS Indonesia.¹³

Penangkapan tersebut dilakukan oleh personel TNI/Polri di kompleks Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Cilopadang, kecamatan Majenang, Cilacap, 13 Agustus 2014. Dari hasil penangkapan tersebut, berhasil ditemukan sejumlah barang bukti berupa atribut ISIS seperti bendera ISIS, topi, kaos, sebuah pin, dan penutup muka.

¹³<http://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-penangkapan-chep-hernawan-presiden-isis-indonesia.html> diakses pada tanggal 19 September 2014

B. Protection: Melindungi Indonesia Dari Pengaruh ISIS

Merupakan sebuah upaya melindungi warga negara serta infrastruktur di suatu Negara dan meminimalisir kerentanan mereka terhadap serangan. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan keamanan batas negara, sistem transportasi umum, dan infrastruktur lainnya.

Kita perlu meningkatkan perlindungan dan pengawasan di perbatasan suatu negara dengan maksud agar para teroris menjadi lebih sulit mengetahui atau minimal menduga untuk masuk, beroperasi di dalam suatu negara. Peningkatan atau perbaikan di bidang teknologi untuk mengetahui data-data penduduk yang keluar masuk suatu negara juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan perbatasan. Bicara tentang keamanan batas negara kita juga tidak boleh lupa memperhatikan standar keamanan transportasi baik domestik maupun lintas negara baik transportasi darat, udara maupun perairan. Kita harus meningkatkan keamanan di setiap tempat aktivitas transportasi.

Pertama, Indonesia memperketat perbatasan negaramenghadapi ancaman ISIS. Belajar dari sejarah masa lalu tentang pertumbuhan radikalisme di Indonesia, pemerintah Indonesia tengah memperkuat keamanan di sepanjang perbatasan negara. Menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Penanggulangan terorisme (BNPT),

badan Intelijen, Militer, dan Polri akan mengkoordinasikan upaya untuk mengamankan perbatasan negara terhadap ancaman jihad.¹⁴

Menurutnya, wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia serta juga perbatasan antara Filipina Selatan dan Sulawesi adalah penting. Wilayah tersebut merupakan tempat-tempat dimana kelompok radikal dapat melintasi perbatasan menggunakan identitas palsu. Kelompok militan bisa datang untuk berdakwah, merekrut, dan mungkin juga untuk menyalurkan senjata.

Menurut kepala BNPT, Ansyad Mbai, peningkatan keamanan perbatasan menjadi sangat penting, sejak para pengikut ISIS menyatakan keinginan mereka untuk membangun sebuah kekhalifahan di kawasan Asia Tenggara. Mengamankan perbatasan tidak hanya akan mencegah kelompok militan menyeberang ke Indonesia, tetapi juga mencegah kelompok militan dalam negeri melarikan diri ke negara tetangga.

Di masa lalu, militan Al-Qaeda menyeberang ke Indonesia dari Malaysia dan Filipina begitupun sebaliknya dengan memanfaatkan kelemahan keamanan perbatasan. Pentingnya mengantisipasi ancaman kekerasan setelah para jihadis Indonesia kembali dari Timur Tengah, karena kelompok militan dan pengikut ISIS ini memiliki mimpi yang lebih besar yaitu menyatukan semua umat Islam di bawah khalifah.

Mengamankan perbatasan sangat penting untuk memerangi penyebaran ISIS secara internasional. Dalam hal ini, Indonesia mulai lebih berhati-hati lagi,

¹⁴<http://khabarsoutheastasia.com/id/articles/apwi/articles/features/2014/10/09/feature-04> diakses pada tanggal 2 Oktober 2014

lebih fokus terhadap warga negara asing yang bepergian ke Indonesia. Mengamankan perbatasan perlu adanya bantuan dari masyarakat. Upaya ini harus diikuti dan didukung oleh masyarakat terutama mereka yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan Indonesia. Mendidik mereka bahwa ideologi ISIS tidak sesuai dengan Islam dan bahwa umat Islam harus berjuang melawan dan mencegah penyebaran ideologi ISIS di Indonesia.

Kedua, dalam mencegah agar ISIS ini tidak lebih berkembang di Indonesia, Indonesia juga akan memperketat pengawasan terhadap perjalanan WNI ke Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Hukum dan HAM serta Polri akan mengawasi adanya perjalanan warga (WNI) ke negara-negara konflik seperti di Timur Tengah dan kawasan Asia Selatan. Hal itu dilakukan untuk memastikan aktivitas yang dilakukan bukan terkait jejaring teroris termasuk Islami States of Iraq and Syria (ISIS) atau yang juga dikenal Islamic State tersebut.¹⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan, mereka yang terbukti berkaitan dengan ISIS akan kehilangan status kewarganegaraannya. Indonesia memang tidak akan melakukan pelarangan terhadap warga negaranya untuk bepergian ke luar negeri, namun jika terbukti terkait dengan ISIS maka bisa mendapatkan tindakan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut yaitu UU Nomor 12 tahun 2006 mengatur soal pencabutan kewarganegaraan yaitu pada pasal 23 huruf e dan

¹⁵<http://www.beritasatu.com/politik/200610-kasus-isis-indonesia-perketat-pengawasan-perjalanan-wni-ke-timur-tengah.html> diakses pada tanggal 19 September 2014

f. WNI dicabut kewarganeraan jika masuk dalam dinas aktif militer di negara asing dan pegawai yang memiliki unsur negaranya. Kedua, apabila menyatakan sumpah dan janji setia kepada negara lain.

C. Response: Kerjasama Indonesia Menghadapi ISIS

Prinsip yang keempat ini menuntut suatu negara ataupun suatu kawasan untuk bekerja sama lebih erat dengan organisasi internasional dan negara lain. Usaha ini dimunculkan karena menyadari sifat terorisme yang tersebar secara global, sehingga diperlukan kerjasama untuk bisa saling berbagi informasi mengenai aktivitas terorisme, serta strategi-strategi terbaik untuk menanggulangi ancaman ini.

Korban dari ISIS tidak hanya di satu negara, tetapi di beberapa negara. Baik korban jiwa maupun perekrutan anggota. Atas dasar itu, kerjasama internasional sangat perlu dalam menghadapi terorisme. Sehingga dalam upaya yang keempat ini, Indonesia melakukan berbagai kerjasama dengan negara lain dalam menghadapi ISIS di kawasan Asia Tenggara, seperti:

D1. Indonesia Ingin Membantu AS Memerangi ISIS di Asia Tenggara

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia melihat Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai ancaman besar bagi dunia, dan Jakarta berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama dengan Washington untuk menghadapi kelompok radikal ini di Asia Tenggara.¹⁶

¹⁶<http://news.detik.com/read/2014/12/20/044922/2783084/1148/1/indonesia-ingin-bantu-as-perangi-isis-di-asia-tenggara> diakses pada tanggal 16 Januari 2015

Sebagaimana dilansir The Washington Times, Jenderal Moeldoko meminta kepada militer Amerika Serikat agar diizinkan untuk ikut berpartisipasi sebagai peninjau dalam Gugus Tugas anti ISIS di Washington. Selain itu juga untuk bekerjasama memperkuat kemampuan analisa intelijen para pejabat militer Indonesia dalam mencegah ancaman ISIS.

Seperti yang telah kita ketahui juga, Amerika Serikat sebagai negara super power di dunia, tentu memiliki kekuatan militer dan intelijen yang baik. Tercatat Amerika Serikat memiliki sekitar 1,3 juta pesonil militer, lebih dari 30.000 kendaraan lapis baja, 13.000 pesawat dan helikopter tempur, 10 kapal induk, 72 kapal selam dan puluhan kapal perang lain.¹⁷

Dalam pertemuan kedua negara ini, ISIS menjadi topik dominan yang dibahas terutama karena para pejabat TNI di Jakarta mengaku memiliki informasi tentang warga negara Indonesia yang jumlahnya hingga sudah mencapai ratusan melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk bergabung dengan gerakan ekstremis ISIS.

Untuk mengatasi ancaman ISIS ini menjadikan kesempatan bagi hubungan Indonesia-Amerika Serikat untuk meluaskan kerjasama militernya. Indonesia dan Amerika Serikat dapat berbagi kepentingan yang sama berdasarkan kawasan, dan tentunya juga dalam masalah ISIS.

¹⁷ <http://www.dw.de/kekuatan-militer-terbesar-2015/g-18251030> diakses pada tanggal 23 Maret 2015

D2. Indonesia Bersama Negara-Negara Asia-Pasifik Bergabung untuk Mengalahkan Ancaman ISIS

Negara-negara Asia-Pasifik bertekad untuk lebih banyak bekerja sama dalam meningkatkan kegiatan penanggulangan teroris, menghadapi meningkatnya pengaruh regional Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).¹⁸

Pada KTT ke-25 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), di Nay Pyi Daw, Myanmar pada 12 dan 13 November 2014, Indonesia beserta anggota ASEAN lainnya dan negara-negara yang berpartisipasi dalam KTT Asia Timur ke-9 yang berlangsung bersamaan, menyatakan komitmen mereka untuk bertindak bersama-sama melawan ancaman ISIS.

Dalam pertemuan tersebut, para anggota menyatakan mengemukakan keras munculnya kekerasan dan kebidaban yang dilakukan oleh organisasi teroris di Irak dan Suriah tersebut (ISIS). Mereka berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama baik di tingkat bilateral, regional, maupun internasional dalam mencegah, menghambat, dan memerangi terorisme. Diikuti dengan langkah-langkah atau upaya anti-terorisme seperti menyerang terorisme sampai pada akarnya, memperkuat kontrol perbatasan dan imigrasi, serta melakukan operasi pelatihan bersama.

Warga negara yang bergabung dengan ISIS ini dikhawatirkan akan menimbulkan ancaman yang tidak hanya bagi rakyat Irak maupun Suriah, tetapi juga bagi negara asal para pejuang ISIS tersebut setelah kembali dari Irak dan

¹⁸ <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2014/11/21/southeast-asia-isis> diakses pada tanggal 27 Januari 2015

Suriah. Karena mereka telah mendapatkan keterampilan dan keahlian serta telah menjadi bagian dari jaringan teroris.

Para pemimpin negara anggota dalam pertemuan tersebut juga kembali menegaskan komitmen mereka dalam menanggulangi terorisme, termasuk bila perlu, melaksanakan Konvensi ASEAN tentang Penanggulangan Terorisme dan Rencana Aksi Komprehensif ASEAN tentang Penanggulangan Terorisme. Keduanya bertujuan untuk menekan terorisme dengan menangani akar permasalahannya dan memutus jaringan teror serta saluran pendanaannya.

D3. Kerjasama Indonesia-Malaysia Menghadapi ISIS di Asia Tenggara

Hishamuddin Hussein, Menteri Pertahanan Malaysia mengonfirmasikan kesepakatan dengan Indonesia untuk menghadapi kelompok teroris ISIS yang telah menjadi ancaman bagi kawasan Asia Tenggara.¹⁹ Kesepakatan Indonesia–Malaysia tersebut diantaranya pertukaran informasi dan pengawasan terhadap pergerakan anggota ISIS yang melakukan aksi teror di Irak dan Suriah, khususnya pengawasan atas situs-situs jejaring sosial.

Kerjasama kedua negara ini dinilai penting karena sebagai dua negara besar Muslim dan sebagai anggota ASEAN agar dapat meminta seluruh anggota ASEAN untuk bergabung dalam kerjasama ini untuk menghadapi teroris ISIS yang pengaruhnya telah masuk sampai di kawasan Asia Tenggara. Terlebih di kawasan Asia Tenggara ini, khususnya Indonesia dan Malaysia ditengarai pengaruh ISIS telah masuk di kedua negara tersebut. Sehingga, dalam kondisi

¹⁹ <http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/92514-strategi-indonesia-malaysia-menghadapi-isis-di-asia-tenggara> diakses pada tanggal 3 Maret 2015

yang demikian membuat kerjasama kedua negara ini sangat urgen dalam menghadapi kelompok ISIS di kawasan Asia Tenggara.

Kelompok-kelompok teroris atau radikal yang memang sudah ada sejak lama di Filipina contohnya, seperti Bangsa Moro dan Abu Sayyaf, disinyalir memiliki hubungan dengan organisasi-organisasi militan di Malaysia maupun di Indonesia. Bahkan kelompok radikal tersebut mengumumkan berdirinya Negara Islam di kawasan menyebabkan semakin meningkatnya kekhawatiran meluasnya pemikiran atau ideologi ISIS di Asia Tenggara.

Dengan mencermati kenyataan yang sudah seperti itu, menurut Malaysia langkah pertama yang baik untuk dilakukan adalah membentuk pasukan penjaga perdamaian ASEAN di bawah panji PBB, kemudian disusul dengan kesepakatan untuk lebih aktif dalam kerjasama regional dalam mencegah masuknya kekacauan yang sedang terjadi di Irak maupun di Suriah sana.

Kesepakatan terbaru antara Indonesia dan Malaysia ini sebagai dua negara besar anggota ASEAN sekaligus memiliki penduduk Muslimnya yang banyak, bekerjasama dalam berbagi informasi dan pengawasan ketat atas aktivitas ISIS di kawasan Asia Tenggara diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi kerjasama seluruh anggota ASEAN untuk memerangi masalah ekstremisme ISIS di kawasan.

D4. Kerjasama Indonesia-Australia (Traktat Lombok 2014)

Indonesia dan Australia menyepakati kerjasama intelijen dalam kerangka kerjasama keamanan atau Traktat Lombok di Nusa Dua, Bali, pada 28 Agustus

2014.²⁰ Kesepakatan kerjasama intelijen tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop.

Dalam satu kesepakatan bersama tersebut berisi dua butir kesepakatan, yaitu pertama, kedua negara tidak akan menggunakan setiap intelijen mereka, termasuk kapasitas penyadapan, atau sumber-sumber daya lainnya dengan cara-cara yang dapat merugikan kepentingan dari kedua negara tersebut. Kedua, berisi kedua negara akan mendorong kerjasama intelijen antara lembaga-lembaga dan badan-badan yang relevan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara.

Menurut Bishop, Menteri Luar Negeri Australia tersebut bahwa kerjasama intelijen yang kuat diantara kedua negara ini merupakan aspek penting dan cara paling efektif untuk mengalahkan pihak lain yang akan mengancam orang Australia ataupun orang Indonesia. Para menteri luar negeri ataupun kepala badan intelijen masing-masing negara akan mengadakan pertemuan-pertemuan sebagai tindak lanjut atas tata perilaku pelaksanaan perjanjian Traktat Lombok ini.

Pertemuan-pertemuan tersebut akan berarti penting untuk menghadapi tantangan-tantangan keamanan di masing-masing negara, regional, dan internasional. Termasuk ancaman dari kelompok radikal di Irak dan Suriah, yaitu ISIS yang telah menyebar di Asia Tenggara bahkan Australia. Karena pihak Australia menaksir bahwa sekitar 150 warganya kini tengah berperang bersama

²⁰<http://www.antarasultra.com/berita/273613/indonesia-australia-sepakati-kerja-sama-intelijen> diakses pada tanggal 19 September 2014

ISIS di Timur Tengah. Sebanyak 15 warga Australia telah tewas, termasuk di antaranya dua pelaku bom bunuh diri.²¹ Dan mengingat sifat jihad kontemporer yang saling berkaitan dan lintas negara, menyebabkan terjadinya tragedi Bom Bali I pada tahun 2002 yang menewaskan 202 orang, dan 88 korban diantaranya adalah warga negara Australia.

²¹<http://indo.wsj.com/posts/2014/09/02/ancaman-daulah-Islamiah-di-asia-tenggara/> diakses pada tanggal 19 September 2014